


Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital Government Terhadap Pembangunan Desa Sindangheula

Muhammad Amirul Mukminin¹, Syifa Salsabila², Sandra Aura Ramadhani³, Silvia Ramadhani⁴, Muhammad Dehan Sya'bani⁵, Mohammad Imam Kamaluddin⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jl Syekh Nawawi, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kode pos, Indonesia

E-mail: 231380051.muhammad@uinbanten.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20 Juni 2026

Revised: 29 Juni 2026

Accepted: 7 Juli 2026

Kata Kunci

Pemberdayaan, Pemerintahan Digital, Pembangunan Desa

Keywords

Empowerment, Digital Government, Village Development



ABSTRACT

Artikel ini membahas tentang digital government dalam memberdayakan masyarakat untuk mendukung program pembangunan Desa yang berbasis digital, meningkatkan pelayanan publik, serta membantu masyarakat dalam mengatasi kesenjangan informasi yang diperoleh di wilayah desa. E-government desa menjadi sorotan karena percepatan digitalisasi di desa khususnya di pelayanan publik, pemerintah desa tidak lagi berfungsi sebagai penyelenggara administratif konvensional, walaupun demikian, pemerintah desa mampu memanfaatkan teknologi digital upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, interpretasi dan analisis secara mendalam terhadap makna subjektif. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang sudah peneliti siapkan dalam bentuk instrument. Informan dipilih menggunakan teknik purposive, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai strategi pemberdayaan berbasis digital government merupakan langkah yang bijak dalam mengembangkan digitalisasi tingkat desa dan juga menerapkan tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs) di bidang inovasi desa dan kemitraan dalam pembangunan desa

This article discusses digital government in empowering communities to support digital-based village development programs, improve public services, and assist communities in addressing information gaps in village areas. Village e-government has been highlighted due to the acceleration of digitalization in villages, particularly in public services. Village governments no longer function as conventional administrative organizers. However, village governments are able to utilize digital technology to improve efficiency, transparency, and accountability in services to the community. This research uses descriptive qualitative methods, interpretation, and in-depth analysis of subjective meanings. Qualitative research uses data collection methods through observation and interviews that researchers have prepared in the form of instruments. Informants are selected using purposive techniques, data collection is carried out through semi-structured interviews, observation, and documentation. Therefore, this article discusses digital government-based empowerment strategies as a wise step in developing village-level digitalization and also implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) in the field of village innovation and partnerships in village development.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite Muhammad Amirul Mukminin et al (2026) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital Government Terhadap Pembangunan Desa Sindangheula <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6598>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi digital melalui konsep digital government menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, efektivitas administrasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penerapan digital government di tingkat desa diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perkembangan suatu desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduknya. Tingkat kesejahteraan di desa memengaruhi pilihan masyarakat mengenai tempat tinggal. Penurunan jumlah orang yang tinggal di daerah pedesaan ini dikhawatirkan akan berdampak pada berkurangnya generasi yang mau berkontribusi untuk memajukan desa. Sementara itu, desa memegang peranan penting dalam menciptakan keseimbangan antara perkotaan dan pedesaan. Sejak disetujuinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, upaya pembangunan desa semakin didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan desa sebagai pusat dari pembangunan nasional (Muchlashin, 2025).

Dalam konteks ini, penguatan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Penguatan tidak hanya sebatas memberikan bantuan materi atau dana, tetapi juga mencakup usaha untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya dan potensi yang ada. Ide dasar penguatan berfokus pada proses perubahan sosial dan ekonomi yang melibatkan partisipasi, di mana masyarakat berperan sebagai subjek, bukan objek, dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan ini, masyarakat diajak untuk mengenali, mengeksplorasi, dan memaksimalkan potensi lokal mereka dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, universitas, dan sektor swasta (Kaseng, 2025).

Penerapan digital government di desa menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih luas. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan digital desa dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan tanggung jawab. Penelitian menemukan bahwa penggunaan digital dalam pelayanan publik desa mendorong keterbukaan informasi mengenai anggaran dan partisipasi warga. Ditekankan bahwa digital desa dapat mempercepat proses administratif, seperti mengurus surat keterangan domisili, izin usaha, dan pelayanan kependudukan. Di sisi lain, diungkapkan bahwa salah satu masalah utama adalah keterbatasan keterampilan digital dari aparat desa dan masyarakat, yang menghalangi pemanfaatan maksimal sistem informasi berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini masih terfokus pada studi kasus penerapan di desa tertentu atau penilaian teknis terhadap sistem informasi desa. Masih sedikit kajian literatur yang komprehensif membahas peta peluang, tantangan, dan rekomendasi strategis untuk pengembangan digital desa dalam konteks pelayanan publik.

Desa Sindangheula merupakan salah satu desa yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan public. Namun, pelaksanaan digital government di Desa Sindangheula masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok usia lanjut, masih lebih memilih akses pelayanan secara langsung di kantor desa dibandingkan menggunakan layanan berbasis digital. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemberdayaan masyarakat berbasis digital government terhadap pembangunan Desa Sindangheula.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menekankan pada proses pemahaman, interpretasi, serta pengungkapan penjelasan yang diberikan oleh informan. Menurut (Tri Wulandari, Dewi Purnama Sari, 2024), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena social dan budaya secara mendalam melalui deskripsi serta interpretasi terhadap data yang diperoleh dari lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta pemahaman informan terkait fenomena yang diteliti, sedangkan

observasi dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan data hasil wawancara. Menurut (Roosinda et al., 2021), wawancara dan observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang efektif dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari sumber data.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sindangheula dengan focus pada strategi pemberdayaan masyarakat berbasis digital government terhadap pembangunan desa. Informan peneliti dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dengan tetap berpedoman pada panduan wawancara yang telah disusun. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan pelaksanaan digital government di Desa Sindangheula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan komunitas melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Ide ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang memiliki hak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kebutuhan dan kepentingan mereka. Dalam praktiknya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan struktur organisasi, serta peningkatan kesadaran komunitas dalam memanfaatkan potensi yang ada. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mandiri dan berkelanjutan (Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, 2023).

Konsep pemberdayaan masyarakat sangat sesuai diterapkan di Desa Sindangheula, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Desa ini memiliki berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan komunitas, baik dari aspek sumber daya manusia, alam, maupun organisasi masyarakat. Melalui pemberdayaan, masyarakat di Desa Sindangheula bisa terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan program, melaksanakan kegiatan, hingga menilai hasil pembangunan. Keterlibatan warga sangat penting agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya di desa (Arweni Arweni et al., 2025). Dengan mengembangkan konsep desa digital, Desa Sindangheula memiliki potensi besar untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu masyarakat mendapatkan akses informasi yang lebih luas, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka lebih banyak peluang usaha. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha produktif dan memasarkan produk lokal. Dengan dukungan teknologi, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan daya saing dan beradaptasi dengan kemajuan zaman yang semakin pesat (Margolang, 2018).

Pemberdayaan masyarakat di Desa Sindangheula juga dapat dilakukan melalui penguatan beragam organisasi dan kelompok masyarakat yang telah ada, seperti PKK, Karang Taruna, kelompok tani, kelompok usaha mikro, serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Organisasi-organisasi ini memiliki peran vital sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuannya dalam mengelola berbagai potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang menekankan peningkatan kelembagaan, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif (Alfitri, 2015). Dari penjelasan tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Desa Sindangheula. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan seluruh warga, diharapkan tercipta komunitas yang mandiri, produktif, dan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan dampak pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian, Desa Sindangheula dapat berkembang menjadi desa yang maju, inovatif, dan berdaya saing di masa yang akan datang (Margayaningsih, 2018).

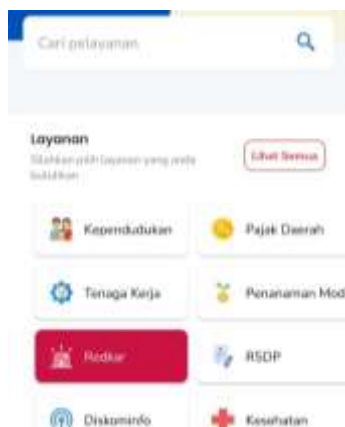
Digital Government

Di era digital, teknologi informasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi telah menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pemerintah desa meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain mendukung administrasi pemerintahan, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan desa melalui pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan digital government menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan (Alim & Ibrahim, 2024).

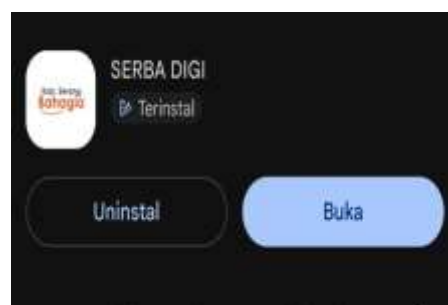
Digital government adalah pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. (Widiastuti, 2025) menjelaskan bahwa digital government bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi agar layanan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Maka dari itu, pengembangan strategi pemerintah digital di Desa Sindangheula harus disertai dengan usaha untuk meningkatkan pemahaman digital di kalangan masyarakat, terutama bagi orang-orang yang lanjut usia masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang berbasis teknologi.

Implementasi digital government di Desa Sindangheula sudah mulai diterapkan dalam beberapa pelayanan administrasi, meskipun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebagian besar warga memilih datang langsung ke kantor desa ketika mengurus surat-menyurat. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat, terutama yang sudah lanjut usia, belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Seperti yang disampaikan oleh ibu Rokasah, ketika membutuhkan surat administrasi, ibu Rokasah biasanya langsung datang ke kantor desa karena pelayanan tersebut masih dilakukan secara offline. Meskipun pelayanan surat-menyurat masih dilakukan secara offline, Masyarakat sudah mengenal penggunaan aplikasi *Serang Bahagia* untuk mengurus dokumen kependudukan. Ibu Wulan menceritakan bahwa pernah menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan prosesnya berjalan dengan cepat, bahkan dapat selesai dalam waktu satu hari. Sama seperti Ibu Rokasah yang mengatakan bahwa penggunaan aplikasi *Serang Bahagia* berjalan lancar tanpa adanya kendala.

Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital masih beragam. Seperti ibu Marni yang belum terlalu memahami penggunaan teknologi sehingga sering minta bantuan kepada ibu Wulan ketika harus melakukan layanan berbasis digital. Selain itu juga pak Ruli selaku bagian dari kesejahteraan desa menjelaskan bahwa pelayanan surat-menyurat di Desa Sindangheula hingga saat ini masih dilakukan secara langsung di kantor desa. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penerapan digital government di Desa Sindangheula sudah berjalan melalui penggunaan aplikasi *Serang Bahagia*, tetapi masih diperlukan pemberdayaan Masyarakat agar kemampuan literasi digital dapat dilakukan secara lebih luas.



Gambar.1



Gambar.2

Gambar.1 merupakan tampilan Aplikasi Serang Bahagia dan Gambar.2 tampilan Aplikasi Serang Bahagia di play store, Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026

(Nursetiawan & Sujai, 2025) menjelaskan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan warga desa masih merupakan hambatan dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk layanan

publik. Fenomena ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh kehadiran teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dapat menggunakan teknologi itu. Pengenalan penggunaan aplikasi pelayanan publik, pendampingan kepada warga, serta pelatihan dasar tentang penggunaan layanan digital bisa menjadi langkah yang diambil untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemanfaatan teknologi. Dengan adanya dukungan tersebut, pemerintah digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi sarana yang bisa meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan membantu pembangunan desa yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nursetiawan & Sujai, 2025).

Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, tetapi juga mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, serta penguatan kelembagaan desa. Dengan demikian, pembangunan desa menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata. (Samaun R et al., 2022).

Pelaksanaan pembangunan desa diawali dengan proses perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam penyusunannya, pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa sehingga program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat yang aktif dapat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi permasalahan, menggali potensi yang dimiliki desa, serta menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pembangunan desa juga didukung oleh penerapan digital government. Digital government merupakan pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui digital government, pemerintah desa dapat menyampaikan informasi pembangunan secara lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta memperoleh berbagai informasi terkait program pembangunan desa melalui media digital yang tersedia.

Desa Sindangheula, pembangunan desa terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan public. Seiring perkembangan teknologi informasi, pemerintah desa juga mulai memanfaatkan teknologi digital dalam beberapa bentuk pelayanan kepada masyarakat. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, sebagian besar pelayanan administrasi desa, seperti pembuatan surat keterangan dan berbagai keperluan administrasi lainnya, masih dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan digital government di DesaSindaheula masih berada dalam tahap pengembangan dan memerlukan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan teknologi digital, masyarakat diharapkan dapat lebih siap dalam memanfaatkan layanan berbasis digital. Dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, digital government dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung pembangunan Desa Sindangheula yang lebih efektif, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan digital government yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lebih mudah, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan desa. Dengan

demikian, strategi pemberdayaan masyarakat berbasis digital government diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan Desa Sindangheula yang lebih efektif, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. (Nain, 2019).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat berbasis digital government di Desa Sindangheula, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten telah mulai diimplementasikan, meskipun masih dalam tahap yang belum optimal. Penerapan digital government di desa ini diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi Serang Bahagia yang memfasilitasi pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara digital.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi digital government dalam konteks pembangunan desa. Pertama, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah, terutama di kalangan warga lanjut usia, menjadi hambatan terbesar dalam pemanfaatan layanan digital secara mandiri. Kedua, ketersediaan infrastruktur digital dan akses internet yang belum merata di seluruh wilayah desa turut membatasi jangkauan layanan. Ketiga, adanya kemauan pemerintah desa untuk terus mendorong transformasi digital menjadi modal sosial yang penting dalam keberlangsungan program. Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis digital government terbukti relevan dan sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin inovasi desa dan kemitraan dalam pembangunan berkelanjutan. Program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa melalui akses informasi yang lebih cepat dan transparan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait: (1) mengadakan pelatihan literasi digital secara berkala bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok lansia dan perempuan; (2) memperkuat infrastruktur jaringan internet di wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses; serta (3) membangun sistem pendampingan berbasis komunitas di mana warga yang melek digital dapat membantu tetangganya dalam mengakses layanan digital, sehingga tercipta ekosistem digital desa yang inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Pertama, penulis menyampaikan penghargaan kepada Bapak Mohammad Imam Kamaluddin, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Sindangheula beserta seluruh aparatur desa yang telah memberikan izin, kemudahan akses, dan informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Terima kasih kepada seluruh informan warga Desa Sindangheula yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berbagi pengalaman mereka terkait implementasi layanan digital di desa. Penulis juga berterima kasih kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama proses penelitian berlangsung.

REFERENSI

- Alfitri. (2015). *Comunity Development : Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, 151, 10–17.
- Alim, M. S., & Ibrahim, R. (2024). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digital Desa Moluo Kab. Gorontalo Utara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3793–3802.
- Arweni Arweni, Oktavia Triyani, Wawan Kristanto, Ernanda Laura Herben, & Andi Kristandi. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Desa. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(2), 248–262. <https://doi.org/10.56910/safari.v5i2.3341>
- Kaseng, E. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dalam Pengembangan UMKM

- Community Empowerment Based on Local Potential in UMKM Development. 2(1), 1–8.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. In *Dedikasi: Journal of Community Engagment: Vol. I (Issue 2)*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Muchlashin, A. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Aplikasi Si Polgan dalam Mewujudkan Smart Village di Desa Krandegan , Kecamatan Bayan , Kabupaten Purworejo. 7(1), 245–257. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6887>
- Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Nain, U. (2019). Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohiistoris. *Garis Khatulistiwa*, 1–37.
- Nursetiawan, I., & Sujai, I. (2025). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital Government dan Potensi Sumber Daya Lokal oleh Pemerintah Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. 12, 474–489.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., Astiti, K. A., Hikmah, N., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Zahir Publishing.
- Samaun R, Bakri B, & Mediansyah A R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33.
- Tri Wulandari1, Dewi Purnama Sari 2, A. R. N. (2024). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. *Sports Culture*, 15(1), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Widiastuti, I. (2025). Implementasi Digital Government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sukajaya Jawa Barat. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 11(2), 18–28. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v11i2.8826>